

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan siber merupakan salah satu bentuk keamanan yang dianggap penting oleh negara untuk menjaga keutuhannya. Berdasarkan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) keamanan siber yaitu sebagai kegiatan yang berkaitan dengan komputer untuk mencapai kepentingan pribadi, keuntungan finansial, atau tindakan merusak dengan cara melanggar kerahasiaan suatu informasi, perusakan data, dan lain sebagainya.¹ Sehingga apabila suatu negara tidak mementingkan keamanan sibernya akan dapat membahayakan negara tersebut. Bahaya yang timbul yaitu seperti menguasai, mengganggu, serta menghentikan komunikasi dan bahkan merubah arus informasi sehingga dapat merugikan dan menghancurkan suatu negara.²

Terkait dengan keamanan siber ini Indonesia dengan Australia memiliki hubungan yang kurang begitu baik. Hubungan yang kurang baik antara Indonesia dengan Australia disebabkan karena kasus kejahatan siber yang dilakukan oleh Australia. Australia melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat Indonesia yang mana dalam daftar pejabat yang disadap tersebut juga terdapat nama Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penyadapan

¹ United Nation, "Cybercrime" (United Nation Office on Drugs and Crime, n.d.), diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/global-programme-cybercrime.html>. Pada 19 April 2022.

² Bagus Artiadi Soewardi, "Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) Yang Tangguh Bagi Indonesia," *Potensi Pertahanan* (Jakarta: Media Informasi DITJEN POTHAN KEMHAN, 2013).

terhadap SBY dilakukan oleh Australia pada saat presiden menghadiri konferensi tingkat tinggi 20 Negara (G20) yang dilaksanakan di London pada tahun 2009.³

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini merupakan suatu yang bertentangan dengan Traktat Lombok yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 2006. Traktat Lombok merupakan sebuah bentuk kerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia, yang memiliki nama resmi *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*.⁴ Dalam Traktat Lombok ini dibahas mengenai kerja sama politik dan keamanan untuk kedua negara.⁵

Tindakan penyadapan terhadap Presiden SBY dilakukan oleh pihak Australia melalui telepon genggam milik presiden. Informasi aksi penyadapan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Australia melalui badan intelijen Australia terhadap Presiden SBY dibocorkan oleh Edward Joseph Snowden yang dulunya pernah bekerja di *National Security Agency (NSA)*. Snowden mengatakan bahwa NSA bekerja sama dengan direktoral sandi pertahanan Australia untuk mengetahui bagaimana struktur jaringan komunikasi pertahanan Indonesia.⁶

³ Ahmad Mafud Shaffan, "Respons Indonesia Terhadap Kasus Penyadapan Australia," *Journal of International Relations* 4, no. November 2013 (2018): 285–294.

⁴ Taruna Rastra Sakti, "Kerjasama Keamanan : Studi Kasus Traktat Lombok Antara Indonesia Dan Australia," *Hubungan Internasional*, no. 1 (2016): 99–114.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007. Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation*). 18 Desember 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 167. Jakarta.

⁶ Lisbet Sihombing, "Sikap Indonesia Terhadap Isu Penyadapan Amerika Serikat Dan Australia," *Info Singkat Hubungan Internasional* V, no. 21 (2013): 6, diakses melalui

Dengan terkuaknya tindakan penyadapan ini Presiden SBY merespon dengan tegas dari kantor presiden. Respon-respon yang dikeluarkan oleh Presiden SBY tahun 2013 saat itu yaitu menunggu penjelasan dan tanggung jawab Australia atas kasus penyadapan, akan mengkaji ulang sejumlah agenda kerja sama dengan Australia, meminta perlu ada semacam protokol, atau kode etik (*code of conduct*), dan *guiding principle* menyangkut kerja sama di berbagai bidang.⁷ Selain dari respon yang dilakukan presiden, pemerintah Indonesia juga mendesak permintaan maaf dari pemerintah Australia. Akan tetapi pemerintah Australia tidak mengindahkan desakan dari pemerintah Indonesia sehingga berbuntut pada dipanggil pulanginya duta besar Indonesia untuk Australia pada saat itu.⁸

Namun setelah berakhirnya masa jabatan Presiden SBY dan mulai masuk masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pemerintah Indonesia membangun hubungan di bidang keamanan yang mana memiliki sejarah yang kurang baik. Sehingga dalam penelitian ini membahas mengenai perubahan kebijakan luar negeri Indonesia bidang siber terhadap Australia yang berujung pada terbentuknya hubungan antara kedua negara meskipun berdasarkan sejarahnya hubungan antara Indonesia dengan Australia dalam bidang keamanan siber tidak terlalu baik semenjak terbongkarnya kasus penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia pada tahun 2013.

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-V-21-I-P3DI-November-2013-69.pdf pada 21 Maret 2022

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Tiga Langkah Indonesia Untuk Australia," *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*, last modified 2013, diakses melalui <https://kominfo.go.id/content/detail/3534/tiga-langkah-indonesia-untuk-australia/0/berita>. Pada 21 Maret 2022.

⁸ Dugis, (2017), "Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia."

Pada saat dilakukannya penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia sampai dengan menjatuhnya Presiden Joko Widodo menggantikan Presiden SBY keadaan kawasan Indo-Pasifik juga sedang tidak stabil. Ketidakstabilan yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik yaitu karena adanya perselisihan antara beberapa pihak. Pihak yang dimaksud dalam perselisihan ini yaitu negara-negara besar seperti AS, Tiongkok, Australia. Negara-negara besar ini berselisih diberbagai bidang yang salah satu dari berbagai bidang tersebut adalah bidang keamanan siber.

Walaupun memiliki sejarah yang kurang baik dalam bidang siber pada masa pemerintahan Presiden SBY, namun pada pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia membangun hubungan dalam bidang keamanan siber dengan Australia. Hubungan yang dibangun oleh pemerintah yaitu melalui *Indonesia-Australia Cyber Policy Dialogue*. Dialog ini merupakan dialog yang dilakukan dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan kesamaan tujuan, dengan *goals* untuk mempererat kerja sama di bidang siber.⁹ Dalam pertemuan pertama *Indonesia- Australia Cyber Policy Dialogue* yang diselenggarakan di Canberra, pada saat itu Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen terhadap internet yang terbuka, gratis, dan aman untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi, serta dalam pertemuan ini kedua pihak memutuskan untuk lebih memperdalam kerja sama guna menghadapi ancaman siber di masa-masa yang akan datang.¹⁰ Dengan adanya dialog antara Australia dan

⁹ Australian Government, "First Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue" (Canberra, 2017), diakses melalui <https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/australia-indonesia-cyber-policy-dialogue>. Pada 19 April 2022.

¹⁰ Elva Azzahra Puji Lestari, "Complex Interdependence Between Indonesia-Australia Through Cybersecurity Cooperation Post-Indonesia-Australia Cyberwar in 2013," *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2021): 178–188.

Indonesia ini kedua negara setuju bahwa dialog ini penting dan akan menjadi fondasi yang kuat untuk kerja sama di masa yang akan datang.¹¹

Meskipun memiliki sejarah yang kurang baik Indonesia tetap memilih menjalin hubungan di bidang keamanan siber dengan Australia. Terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kebijakan luar negeri Indonesia mengarah kepada kerja sama bilateral dengan Australia terutama dalam bidang siber.¹² Karena hal inilah pembahasan ini jadi menarik untuk dibahas karena sejarah keamanan siber antara Australia dengan Indonesia yang tidak begitu baik akan tetapi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang siber malah tertuju kepada menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui Traktat Lombok pada tahun 2006, Indonesia dan Australia telah berkomitmen dalam menjalin hubungan kerja sama dalam bidang politik dan keamanan. Namun pada tahun 2013, terkuak kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat di Indonesia, terutama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menciderai hubungan kerja sama keamanan kedua negara. Di lain sisi, pada masa jabatan Presiden Joko Widodo terdapat kebijakan luar negeri Indonesia mengenai menjalin hubungan dengan Australia dalam bidang keamanan. Salah satu hasil dari perubahan kebijakan luar negeri ini yaitu dilaksanakannya *Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue*. Hal ini menjadi

¹¹ Lestari, "Complex Interdependence Between Indonesia-Australia Through Cybersecurity Cooperation Post-Indonesia-Australia Cyberwar in 2013."

¹² Dugis, "Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia."

menarik untuk dibahas karena Indonesia memiliki sejarah yang kurang baik dengan Australia di bidang keamanan siber, namun dibentuklah kebijakan luar negeri untuk menjalin kerjasama dalam bidang keamanan siber dengan Australia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian menarik pernyataan penelitian yaitu “Apa faktor yang mendasari perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Australia dalam bidang siber?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang apa yang mendasari perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Australia dalam bidang siber

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: Secara akademis, penelitian ini dapat sebagai referensi literatur pembaca tentang perubahan kebijakan luar negeri Indonesia bidang siber terhadap Australia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan luar negeri terutama yang berkaitan dengan keamanan siber di masa yang akan datang.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka pertama adalah sebuah artikel jurnal yang berjudul “Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber

dan Sandi Negara” yang ditulis oleh Hidayat Chusnul Chotimah.¹³ Indonesia merupakan negara yang rentan dan tidak luput dari serangan siber. Dapat dilihat dari beberapa kasus sejarahnya seperti pada tahun 1998 terjadinya kerusuhan dunia siber yang mana Indonesia berperang dengan *hacker* yang diduga dari Tiongkok dan Taiwan, serta pada tahun 2013 terkuaknya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Berdasarkan analisis data system *monitoring traffic* ID-SIRTII (*Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure*) serangan siber terhadap Indonesia kian meningkat setiap tahunnya. Dengan besarnya Ancaman siber Indonesia membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berperan dalam menjalin koordinasi dan kerjasama antar Institusi dan pemangku kepentingan bidang siber dalam lingkup nasional dan internasional.

Hasil dari penelitian ini yaitu dengan banyaknya kejahatan siber yang terjadi di Indonesia dibentuklah BSSN yang memiliki peran penting selaku pelaksana diplomasi siber Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain seperti Australia, Kerajaan Inggris Raya, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Pembeda dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada fokus kajian yang dipilih yaitu peneliti berfokus kepada BSSN yang berperan untuk menjalin kerjasama siber dengan pihak lain sedangkan penulis berfokus kepada perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Australia. Peran penelitian ini bagi penulis yaitu untuk melihat organisasi pemerintah yang berhubungan dengan perubahan kebijakan luar negeri bidang siber.

¹³ Hidayat Chusnul Chotimah, “Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Indonesia Di Bawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara,” *Politica* 10, no. 2 (2019): 113–128.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Kerja Sama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia Dengan *Department Of Foreign Affairs And Trade* (DFAT) Australia Dalam Pengembangan *Cyber Security*” yang ditulis oleh Dhiyanka Magrisa.¹⁴ Setiap tahunnya Indonesia menerima banyak serangan siber dari berbagai pihak. Sehingga salah satu cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi dan meminimalisir serangan siber ini yaitu dengan membangun kerjasama dengan negara lain. Salah satu negara yang *concern* dalam bidang keamanan siber yaitu Australia. Sehingga Indonesia memutuskan bekerjasama dengan Australia untuk memperkuat keamanan siber.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan banyaknya serangan siber yang terjadi kepada Indonesia mendorong Indonesia untuk membangun kerjasama dengan negara yang juga *concern* terhadap masalah keamanan siber. Dalam pembahasan negara yang dimaksud yaitu Australia. Kerjasama yang dijalankan oleh antara Indonesia dan Australia yaitu berupa *cyber boot camp*, *Australia Strategic Policy Institute* (ASPI) dan *cyber policy workshop*, *cyber business connection*, serta *third cyber policy dialogue*. Berbeda dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada fokus kajian yang mana pada tulisan ini berfokus kepada pembentukan kerjasama antara Indonesia dengan Australia sedangkan penulis berfokus kepada perubahan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia. Penelitian ini berguna bagi penulis untuk melihat bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia.

¹⁴ Dhiyanka Magrisa, “Kerja Sama Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia Dengan *Department Of Foreign Affairs And Trade* (DFAT) Australia Dalam Pengembangan *Cyber Security*” 7 (2020): 8.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Dalam Bidang Keamanan Siber” yang ditulis oleh Monica Romaully Weu.¹⁵ Indonesia dan Inggris merupakan negara-negara yang tidak dapat terhindar dari serangan siber. Indonesia telah banyak menerima serangan siber seperti *malware* dan sebagainya. Begitu pula dengan Inggris, Inggris menerima ribuan serangan siber setiap tahunnya. Serangan siber yang diterima Inggris berupa *malware*, *spyware*, dan virus. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Inggris menginisiasi untuk menjalin kerjasama dalam bidang keamanan siber dengan Indonesia. Dengan harapan dapat saling membantu antara pemerintah Inggris dengan pemerintah Indonesia dalam menekan kejahatan siber yang terjadi di kedua negara.

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Inggris dengan pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam bidang keamanan siber pada 14 Agustus 2018. Penerapan kerjasama antara kedua negara diterapkan dalam bentuk *cyber dialogue forum*. Pembahasan dalam dialog yang terjadi yaitu mengenai bagaimana kedua negara saling berbagi informasi dalam membantu dan mengembangkan pemahaman mengenai keamanan siber dalam melakukan pengolahan data, sistem, aset, serta sumber daya manusia. Dalam kerjasama ini dapat dikatakan bahwa kedua pihak memiliki kepentingan yang sama dalam bidang keamanan siber yang harus dipenuhi. Pembeda penelitian ini dengan yang penulis angkat yaitu pada penelitian ini dijelaskan bahwa Inggris dengan Indonesia tidak

¹⁵ M R Weu, “Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Dalam Bidang Keamanan Siber,” *Global Political Studies* 4, no. 2 (2020): 154–169, diakses melalui <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3394/>. Pada 22 Maret 2022.

memiliki sejarah yang buruk dalam bidang siber. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai perbandingan mengenai hubungan yang dimiliki antara Indonesia-Inggris dengan Indonesia-Australia.

Keempat, sebuah artikel jurnal yang berjudul “Perubahan Arah Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat Dalam Program Nuklir Iran Pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani” yang ditulis oleh Hendra Maujana Saragih.¹⁶ Perubahan kebijakan luar negeri Iran pada masa pemerintahan Rouhani menunjukkan keinginan Iran untuk lebih terbuka dengan dunia internasional terkait dengan program nuklirnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan-pertemuan negosiasi Iran dengan negara seperti AS, Perancis, Inggris, Cina, dan Rusia. Perubahan arah kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengurangi sanksi dan embargo yang diterima oleh Iran dari dunia internasional.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan perubahan arah kebijakan luar negeri Iran pada masa pemerintahan Rouhani didorong oleh adanya kepentingan nasional serta upaya untuk menyelamatkan perekonomian nasional Iran, serta berusaha agar sanksi internasional terhadap Iran segera dicabut karena telah membuat perekonomian negara menjadi tidak stabil. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa kepemimpinan Hassan Rouhani, terdapat perkembangan yang positif terutama dalam politik luar negeri Iran. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis angkat yaitu pada penelitian ini berfokus membahas mengenai perubahan kebijakan luar

¹⁶ Hendra Maujana Saragih, “Perubahan Arah Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat Dalam Program Nuklir Iran Pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani,” *Jurnal Interdependence* Vol. 5 (2017): 17–29.

negeri Iran. Penelitian ini berguna bagi penulis untuk sebagai pembandingan mengenai perubahan kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara.

Kelima, sebuah artikel jurnal yang berjudul “Respons Indonesia terhadap Kasus Penyadapan Australia” yang ditulis oleh Ahmad Mafud Shaffan.¹⁷ Penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap pihak Indonesia mulai terkuak pada tahun 2013. Berita tersebut dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA Amerika Serikat, Edward Snowden. Sehingga memperkeruh hubungan yang dimiliki antara Indonesia dan Australia. Dengan adanya permasalahan ini menimbulkan berbagai reaksi dari pihak Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai reaksi yang diambil oleh Indonesia terhadap tindakan yang dilakukan oleh Australia. Reaksi yang ditunjukkan Indonesia yaitu mengambil beberapa tindakan seperti memanggil duta besar Australia untuk Indonesia pada saat itu, memanggil pulang duta Indonesia untuk Australia, dan memutus hubungan sepihak serta mengkaji kembali pertukaran informasi antara kedua negara. Berbeda dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada tujuan penelitian, yang mana pada penelitian ini hanya berfokus pada reaksi dan tindakan yang diambil oleh Indonesia setelah terjadinya penyadapan. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai acuan mengenai tindakan dan reaksi yang diambil oleh Indonesia terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Australia.

¹⁷ Ahmad Mafud Shaffan, “Respons Indonesia Terhadap Kasus Penyadapan Australia.” 4, no. November 2013 (2018): 285-294.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Perubahan kebijakan luar negeri

Menurut Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin kebijakan luar negeri merupakan seperangkat tindakan atau aturan yang mengatur tindakan otoritas politik independen yang ditempatkan di lingkungan internasional.¹⁸ Kebijakan luar negeri selalu berubah tentang bagaimana negara, lembaga, dan masyarakat terlibat satu sama lain dalam sistem internasional yang dinamis.¹⁹ Dalam mengkaji perubahan kebijakan luar negeri dalam bidang siber terhadap Australia, penulis merujuk pada teori dari Charles F. Hermann yang menjelaskan tentang sumber dari perubahan kebijakan dan diteliti menggunakan empat agen perubahan yaitu *leader driven*, *bureaucratic advocacy*, *domestic restructuring*, dan *external shock*. Konsep ini dirasa tepat dikarenakan Indonesia yang semula menghentikan hubungan bilateral negara pada masa pemerintahan Presiden SBY lalu pada pemerintahan Presiden Joko Widodo membangun hubungan dengan pemerintah Australia. Sumber dari perubahan tersebut diantaranya:²⁰

1. *Leader driven*

Pemimpin negara memiliki visi yang dianut sebelum maupun ketika menjabat di dalam pemerintahan negara. Dalam *leader driven* dijelaskan bahwa pemimpin negara memaksakan visinya sendiri sehingga terjadinya pengalihan kebijakan luar

¹⁸ Jean Frédéric Morin and Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*, *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*, 1st ed. (United Kingdom: Palgrave Macmillan Cham, 2018).

¹⁹ Chris Alden and Amnon Aran, *Foreign Policy Analysis*, 2nd Aditio. (London: Routledge, 2016).

²⁰ Charles F Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy," *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3–21.

negeri, sehingga dibutuhkanlah keyakinan, kekuasaan, dan energy dari pemimpin negara untuk memaksa pemerintah mengubah arah kebijakan luar negerinya.²¹ Perubahan tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya pemikiran pemimpin yang menganggap kebijakan lama tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang. Hermann menggunakan istilah *reconceptualization* untuk menjelaskan perubahan kebijakan karena perubahan cara pandang pemimpin dalam menanggapi sebuah fenomena yang terjadi.

2. *Bureaucratic advocacy*

Merupakan *agent of change* yaitu kelompok yang mendukung pengalihan kebijakan luar negeri tersebut. Kelompok ini berasal dari dalam pemerintahan suatu negara atau lingkaran eksekutif yang berurusan langsung dengan permasalahan luar negeri negara. Kelompok ini memberikan pandangan dan pemikiran serta mendukung kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh pemimpin negara tersebut sehingga mampu mengadvokasi pembuat keputusan terkait relevansi suatu kebijakan.²²

3. *Domestic restructuring*

Restrukturisasi domestik mengacu pada segmen masyarakat yang relevan secara politik yang mendukung kebutuhan rezim untuk memerintah dan kemungkinan

²¹ Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

²² Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

bahwa segmen masyarakat ini dapat menjadi agen perubahan.²³ Masyarakat yang dimaksud disini yaitu merupakan masyarakat yang melek terhadap isu dan fenomena domestik maupun internasional sehingga pandangan dan pemikirannya dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan maupun mengubah kebijakan negara.

4. *External shock*

Merupakan sumber perubahan kebijakan luar negeri yang dihasilkan dari acara internasional atau yang berada dari luar teritorial negara. Kebijakan luar negeri dapat berubah dikarenakan persepsi dari kepala pemerintahan yang berubah atau bentuk inisiatif pemerintah dalam merespon isu eksternal. Sehingga baik isu domestik dari dalam maupun internasional dari luar memiliki pengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri negara.²⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka konseptual di atas, penulis akan menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Charles F. Hermann sebagai alat dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral negara dengan Australia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo meskipun sebelumnya Indonesia memiliki hubungan kurang baik dengan Australia yang disebabkan oleh penyadapan oleh

²³ Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

²⁴ Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

Australia yang terungkap tahun 2013.²⁵ Berdasarkan konsep ini peneliti akan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui beberapa aspek seperti pendapat Presiden Joko Widodo terhadap hubungan dengan Australia, organisasi keamanan siber nasional selaku lembaga yang menjalin hubungan siber dengan Australia, pendapat dari para ahli mengenai hubungan Indonesia dengan Australia, serta isu eksternal bagaimana yang mempengaruhi perubahan kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

1.8 Metodologi

Pembahasan dari penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Indonesia bidang siber terhadap Australia . Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data-data dari teks dan arsip yang telah teruji kebenarannya sebagai sumber dasar dari pembahasan penelitian.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif berusaha untuk membangun realitas serta memahami realitas yang ada dengan memperhatikan bagaimana proses peristiwa dan otentisitas yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh analisa yang lebih tajam dan didasarkan kepada data-data, fakta-fakta, serta dinamika penulisan yang telah diterbitkan.²⁶ Penelitian kualitatif ini berusaha menggambarkan dan menganalisis

²⁵ Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

²⁶ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57-65.

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia bidang siber terhadap Australia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian dengan sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁷ Jenis penelitian deskriptif ini berusaha mendeskripsikan apa yang mendasari perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang keamanan siber terhadap Australia.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulisan memberikan Batasan yaitu pada tahun 2014-2017. Tujuan penulis memberikan batasan tersebut karena masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai dari tahun 2014 dimana peneliti membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil saat itu. Sedangkan batas akhir penelitian diambil tahun 2017 karena *Australia-Indonesia cyber policy dialogue* yang merupakan salah satu output kebijakan luar negeri Indonesia pertama kali dilaksanakan.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah unit dasar yang dijadikan sebagai objek observasi dalam penelitian.²⁸ Unit analisis dari penelitian ini yaitu perubahan kebijakan luar negeri Indonesia bidang siber terhadap Australia. hal ini akan diteliti oleh penulis terkait bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia bidang siber terhadap

²⁷ Hardani Dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu., ed. AK Husnu Abadi, A.Md., 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makasar: Syakir Media Press, 2021).

Australia. Unit eksplanasi merupakan unit yang berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati.²⁹ Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah sumber perubahan kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini membahas tentang sumber apa saja yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Level analisis adalah target analisis di mana peneliti dapat memperoleh gambaran (description), penjelasan (explanation) dan perkiraan (prediction) yang akurat tentang perilaku negara.³⁰ Level analisis dari penelitian ini adalah kawasan karena dalam pembahasan penelitian ini berfokus kepada negara yang juga dipengaruhi oleh kawasan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi Pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data-data dari sumber sekunder yang berbentuk literatur akademik berupa; buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita, dan website.³¹ Contoh studi pustaka yang digunakan yaitu seperti yang digunakan dalam penelitian ini seperti dari Hidayat Chusnul Chotimah dengan judul “Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara”, Monica Romaully Weu dengan judul “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam Bidang Keamanan Siber”, dan lain sebagainya. Studi pustaka ini dilakukan dilakukan untuk kepentingan memperoleh data dan fakta yang dibutuhkan dalam menganalisis permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam pencarian data melalui *website* peneliti menggunakan kata

²⁹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*. (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994).

³⁰ David Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations,” *World Politics* 14, no. 1 (2014): 77–92.

³¹ Mas' oed, (1994), *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*.

kunci *cyber policy*, keamanan nasional, *Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue*, kebijakan luar negeri.

Data serta informasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.³² Data sekunder yang digunakan yaitu seperti artikel yang dikeluarkan oleh DPR RI, pemerintah Australia, dan lain sebagainya. Keseluruhan data yang terkumpul kemudian akan diolah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap.³³ Analisis data kualitatif adalah analisis data dengan mengarahkan kepada pendeskripsian dengan rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya.³⁴ Data-data yang digunakan bukan dalam bentuk angka atau numerik melainkan berbentuk analisis data yang dikumpulkan melalui data-data yang relevan yang telah diseleksi sesuai kelompok permasalahan dan kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data-data relevan mengenai perubahan kebijakan luar negeri terutama yang berkaitan dengan keamanan siber dan

³² Dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

³³ Ali Muhson, "Teknik Analisis Kualitatif," *Teknik Analisis* (2018): 1–7,.

³⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 1st ed. (Surakarta: Solo: Cakra Books, 2014).

kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif mengenai perubahan kebijakan luar negeri dalam bidang siber yang dibentuk oleh Indonesia.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang rincian dari penelitian serta Teknik dalam melakukan penelitian yang dibagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Keamanan Siber di Kawasan Indo-Pasifik

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai keamanan siber di kawasan Asia Pasifik, seperti dinamika keamanan siber kawasan, keamanan siber di Indonesia, dan keamanan siber di Australia.

Bab 3: Kebijakan Indonesia Kepada Australia Dalam Bidang Siber

Bab ini mendeskripsikan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia kepada Australia dalam bidang keamanan siber. Kebijakan Indonesia yang dideskripsikan yaitu kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo, serta bentuk perubahan kebijakan Luar negeri yang terjadi.

Bab 4: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bidang Siber Terhadap Australia

Bab ini berisi analisis faktor pendorong perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang siber terhadap Australia, menggunakan konsep yang penulis gunakan.

Bab 5: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian.

